



---

## **Analisis Sekuritisasi Presiden Donald Trump Dalam Kebijakan *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States (2016-2019)***

**Marsanda Aulia, Hermi Susiatiningsih, Satwika Paramasatya**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*In responding to the issue of immigrants, the United States has come up with a controversial policy. Donald Trump brought up the Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States policy to limit the entry of Muslim immigrants into the United States. Donald Trump securitizes the issue by giving a speech act that forms a threat construction in the issue of Muslim immigrants. Until finally the policy that was rejected was accepted by the community and enforced. It is interesting to study how state leaders shape the construction of an issue so that they can get support from the community. This study will reveal this through a key question regarding "How does Donald Trump securitize the issue of immigrants through speech acts in the policy of Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States?". The purpose of this study is to explain the role of Donald Trump as a political elite in conducting securitization through speech acts in the policy of Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States. This research uses the type of explanatory research. In preparing the argument, the researcher uses securitization theory about how an issue phenomenon is interpreted as a threat to the state by the political elite. This study analyzes Donald Trump's statements regarding the issue of Muslim migrants. This study argues that Donald Trump plays a role in the securitization of immigrant issues so as to shape the perception of immigrants as a threat.*

**Keywords:** *Donald Trump, immigrant, speech act, policy*

### **PENDAHULUAN**

Setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, melalui otoritasnya sebagai presiden, Donald Trump membentuk rancangan kebijakan dan memunculkan narasi yang kontroversial. Salah satu strategi kebijakan yang dibentuk oleh Donald Trump adalah mengatur masuknya warga asing ke wilayah Amerika Serikat sehingga warga asing tersebut tidak akan mengganggu keamanan dan merebut hak yang dimiliki warga Amerika Serikat. (Sagas, 2020: 3). Rencana kebijakan

administrasi yang dibentuk oleh Donald Trump yaitu “*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*” atau yang lebih dikenal dengan *Travel Ban*. Kebijakan tersebut membatasi masuknya pendatang dari tujuh negara Muslim yaitu Iran, Iraq, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Yaman (US Government, 2017: 3). Larangan kunjungan tersebut ditetapkan bagi keseluruhan warga negara dari negara yang disebutkan, baik berstatus sebagai imigran maupun bukan imigran. Donald Trump mendorong isu imigran yang bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat Amerika Serikat dari ancaman terorisme dan menyuarakan *American First* sebagai slogan kampanye tahun 2016 (Kaczynski, 2017: 1-2).

*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* memiliki alasan terhadap adanya kekhawatiran bahwa imigran maupun non imigran atau dapat dikatakan sebagai “orang asing” akan mengganggu keamanan dari Amerika Serikat (Winders, 2016: 292). Keberadaan imigran atau “orang asing” di dianggap sebagai bentuk ancaman dan mengganggu keamanan Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat sebelumnya mengalami ancaman keamanan terorisme yang terjadi pada 2001 yang disebut sebagai tragedi 9/11 (Joel, 2003: 500). Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* dari sudut pandang keamanan negara. Disini, peneliti berusaha untuk memberikan argumentasi lain dalam melengkapi kerangka penelitian terdahulu.

Donald Trump melakukan langkah sekuritisasi dengan menggunakan tindak tutur (*Speech act*) untuk membentuk konstruksi bahwa imigran Muslim merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. *Speech act* yang dilakukan bertujuan agar masyarakat menyadari adanya ancaman dan menyetujui dibentuknya kebijakan imigrasi. Diterimanya *speech act* oleh masyarakat kemudian menjadi dasar Donald Trump membentuk kebijakan imigrasi. Argumen dalam penelitian ini adalah Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat berperan dalam membentuk persepsi ancaman terhadap imigran yang berasal dari tujuh negara Muslim dan melakukan sekuritisasi isu imigran tersebut melalui kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*. Dalam hal ini, Donald Trump sebagai *Securitizing actor* mengonstruksikan imigran dari tujuh negara Muslim sebagai ancaman keamanan nasional sehingga membutuhkan sekuritisasi terhadap isu. Sekuritisasi tersebut menyebabkan imigran maupun non imigran yang berasal dari ketujuh negara Muslim tidak dapat memasuki Amerika Serikat. Dengan diterimanya *speech act* oleh masyarakat, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan sekuritisasi melalui kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*.

*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* menjadi kebijakan yang menarik untuk diteliti. Ada sejumlah karya ilmiah yang ditulis orang lain yang mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Muhammad Arraf Rezkia Rachman menulis dengan judul “Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump” di sebuah jurnal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.04, No. 2, tahun 2018 yang diterbitkan Universitas Padjadjaran Bandung (2018). Tulisan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Travel Ban dibentuk karena adanya alasan identitas nasional Amerika Serikat sehingga kepentingan dan keamanan Amerika Serikat menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan.

Terdapat juga skripsi yang ditulis oleh Firda Nabilla berjudul “Analisis Langkah Sekuritisasi oleh Amerika Serikat melalui Kebijakan *Travel Ban* Donald Trump 2016-2018” yang terbit di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020). Skripsi tersebut menganalisis tentang efektivitas kebijakan Travel Ban. Skripsi tersebut menjelaskan

bahwa sekuritisasi yang dilakukan Amerika Serikat dalam kebijakan Travel Ban mengakibatkan pelanggaran dan kekerasan secara tidak langsung kepada pengungsi maupun imigran sehingga kebijakan tersebut tidak efektif.

Penelitian mengenai kebijakan Travel Ban juga dilakukan oleh Ilham Fadil dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Karakteristik Personal Donald Trump dalam Kebijakan *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*” yang telah terbit di Universitas Diponegoro Semarang (2020). Skripsi tersebut menganalisis karakteristik Donald Trump dengan menggunakan enam karakteristik personal seorang individu yang dapat mempengaruhi orientasi dalam kebijakan luar negeri. Skripsi tersebut berusaha untuk menganalisis karakteristik personal Donald Trump dalam membentuk kebijakan Travel Ban

Dari penelitian penelitian tersebut, penulis berusaha untuk memberikan alternatif analisis kebijakan imigran Donald Trump menggunakan konstruktivisme linguistic dan sekuritisasi yang menganalisis penggunaan Bahasa oleh Donald Trump terkhususnya dalam kebijakan Travel Ban. Penulis akan menganalisis mengenai bagaimana elit politik berperan dalam melakukan sekuritisasi isu imigran di Amerika Serikat melalui alasan ancaman keamanan negara. Penelitian ini menawarkan argumentasi yang berbeda dalam rangka melengkapi pemahaman mengenai isu imigran di Amerika Serikat melalui tahapan sekuritisasi yang dibentuk oleh agen atau elit politik domestiknya.

Fokus dari penelitian ini terletak pada sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump sebagai aktor penting dalam kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*. Dalam melakukan analisis sekuritisasi yang dilakukan Donald Trump dalam kebijakan, pertama kami perlu memahami kerangka berpikir mengenai penggunaan bahasa dan *speech act* yang dilakukan aktor. Secara garis besar penelitian ini membahas bagaimana Donald Trump berperan dalam melakukan sekuritisasi melalui medium Bahasa (*Speech act*) dalam kebijakan imigran *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*.

Konsep mengenai kepentingan nasional akan cenderung berubah ubah disesuaikan dengan kondisi yang tengah dihadapi actor (Rosyidin, 2020). Penelitian ini menggunakan aliran konstruktivis yang lebih spesifik, yaitu konstruktivisme linguistik. Hal ini merupakan percampuran dari teori linguistik dengan konstruktivisme. Penggunaan Bahasa tersebut dapat digunakan dalam melakukan suatu tindakan dengan melalui perbedaan antara kalimat pernyataan dan kalimat melaporkan (Searle, 1969: 4). Konsep Permainan Bahasa (*language game*) oleh filsuf Austria Ludwig Wittgenstein menjadi konsep yang menjadi dasar konstruktivisme linguistik. Inti dari gagasan tersebut adalah kata kata tidak hanya pada unsur intrinsiknya namun juga pada konteks bagaimana dan dimana kata kata tersebut diucapkan. Konsep Permainan Bahasa tersebut kemudian menjadi dasar dari teori tindak tutur (*speech act theory*). Teori tindak tutur menjelaskan bahwa di dalam penggunaan suatu bahasa terdapat unsur tindakan dimana pembicara bahasa tersebut menginginkan pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa performative, terdiri dari unsur tindakan yaitu ucapan, maksud, dan respon ucapan tersebut. Sehingga respon yang diberikan terhadap suatu ucapan akan menghasilkan respon yang berbeda beda dari pendengar ucapan.

Teori tersebut kemudian disempurnakan dan membagi bahasa performative menjadi penegasan (*assertive*), janji (*commissive*), perintah (*directive*), pengumuman (*declarative*), dan ekspresi (*expressive*). Inti dari teori yang disempurnakan tersebut adalah kegunaan bahasa tidak hanya sebagai pelaporan dari realitas, namun juga ikut berperan penting untuk membentuk realitas (Searle, 1969: 30). Permainan Bahasa yang

dilakukan penutur memiliki makna dari suatu ucapan sehingga ucapan yang dilakukan penutur memiliki maksud yang disampaikan kepada pendengar. Konstruktivisme linguistik menjadi teori yang dikemukakan oleh Nicholas Onuf. Onuf mempercayai bahwa dengan melalui medium Bahasa, maka suatu agen telah menciptakan realitas.

Pemikiran konstruktivisme juga tertuang dalam teori sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan konsep dari keamanan nasional yang menekankan pada pihak otoritas dalam mengonstruksi isu yang mulanya tidak politis menjadi isu politis sehingga memerlukan adanya pengamanan atau tindakan darurat.. Dalam sekuritisasi suatu isu, terdapat tiga tahapan, yaitu tahap non politis (*non-politized*) yaitu ketika suatu isu masih menjadi bahasan di level masyarakat dan belum menjadi bahasan oleh negara. Lalu politis (*politized*) yaitu ketika isu telah masuk dalam proses politis, dan yang terakhir adalah tersekuritisasi (*securitized*) yaitu ketika isu yang mulanya telah masuk dalam proses politis kemudian disepakati sebagai bentuk ancaman oleh aktor negara sehingga memerlukan tindakan untuk mengatasi isu yang dianggap ancaman tersebut (Buzan, Waever, & Wilde, 1998: 23-24). *Speech act* menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan sekuritisasi. Sekuritisasi yang dilakukan oleh negara diharapkan akan diterima oleh masyarakat, sehingga negara dapat membentuk suatu upaya untuk menanggapi isu ancaman tersebut.

Tiga unsur penting dalam analisis teori sekuritisasi adalah *functional actor*, *securitizing actor*, dan *referent object*. *Securitizing actor* dalam hal ini adalah pihak yang mengkonstruksikan suatu isu sebagai ancaman dan melakukan sekuritisasi terhadap isu atau fenomena yang dianggap mengancam, sedangkan pihak atau sesuatu yang dirasa terancam (*referent object*) adalah negara karena berkaitan dengan konteks keamanan nasional. *Securitizing actor* melakukan sekuritisasi bila *referent object* dianggap mendapatkan ancaman dari suatu isu. Sedangkan *functional actor* merupakan aktor yang terlibat dalam proses sekuritisasi (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 36). Aktor memiliki kemampuan dalam menjadikan isu sebagai bentuk ancaman dan menerapkan sekuritisasi dalam situasi tersebut. Aktor akan mengidentifikasi isu dan mengubahnya menjadi isu keamanan. Untuk mencapai sekuritisasi, aktor melakukan *speech act* yang kemudian diterima oleh aktor lain, umumnya masyarakat. Dengan diterimanya *speech act* oleh masyarakat, maka dapat digunakan sebagai dasar melakukan tindakan untuk mengatasi isu yang dikonstruksi sebagai ancaman tersebut.

Penulis menggunakan pendekatan konstruktivis linguistik dan sekuritisasi didasarkan pada adanya konstruksi isu sebagai sebuah ancaman melalui penggunaan bahasa. Hal tersebut didukung oleh penelitian Barry Buzan dan Ole Waever yang menyatakan bahwa hubungan internasional merupakan serangkaian sekuritisasi isu oleh agen (Buzan, Waever, & Wilde, 1998: 26). Dalam teori sekuritisasi, Bahasa merupakan pembentuk suatu realitas sosial (ancaman). Perlu ditekankan bahwa sekuritisasi memandang sebuah isu yang mulanya tidak mengancam, kemudian dikonstruksikan sebagai bentuk ancaman oleh aktor yang dalam hal ini adalah pemerintah.

## PEMBAHASAN

### **Imigran dan konstruksi isu imigran di Amerika Serikat sebelum Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016**

Memasuki tahun 2001, Amerika Serikat mengalami tragedi yang menjadi awal mula hilangnya kepercayaan Amerika Serikat terhadap imigran Muslim dan memunculkan kecurigaan bahwa imigran Muslim merupakan ancaman dan mengganggu keamanan Amerika Serikat (Joel, 2003: 500). Pelaku berkebangsaan Arab yang

beragama Islam pada kejadian 9/11 tersebut mengakibatkan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap orang asing beragama Islam. Atas dasar kejadian tersebut, Amerika Serikat memusatkan perhatian pada masuknya warga asing terkhususnya yang berasal dari negara Timur Tengah dan warga asing yang beragama Islam.

Pemerintahan Barack Obama berfokus untuk membentuk kebijakan imigrasi dengan mengamankan perbatasan dan bertanggung jawab atas imigran yang memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Barack Obama menekankan kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi dan harus melindungi pihak imigran. Meskipun langkah langkah pengamanan tersebut diambil, imigran maupun non imigran yang berasal dari negara negara Arab dan Muslim tidak pernah dilarang untuk memasuki Amerika Serikat.

Sikap anti-Muslim di antara warga AS meningkat setelah insiden terorisme 11 September 2001 di New York dan Washington, D.C. (Mogahed, 2006). Sampai akhir tahun 2006, ditemukan bahwa 39% warga AS mengaku telah memiliki persepsi buruk terhadap Muslim. Prasangka tersebut muncul dikarenakan sekitar 54% warga AS menganggap serangan 9/11 sebagai konflik berbasis identitas agama Islam (Mekouar, 2021). Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa opini negatif AS tentang Arab atau Muslim tinggi, tragedi 9/11 mengubah persepsi Muslim sebagai inferior dan menjunjung paksaan dan kekerasan. Kurangnya pemahaman warga Amerika Serikat terhadap Muslim mengakibatkan peningkatan kasus rasisme, ketidakpercayaan, dan kebencian (Hashim, 2006).

Setelah tragedi 9/11 berlalu, imigran Muslim masih mendapatkan tindakan diskriminatif oleh oknum anti muslim. Imigran Muslim dikaitkan dengan kriminalitas dan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, adanya ketakutan ancaman terhadap tindakan kriminalitas yang disebabkan oleh imigran Muslim di Amerika Serikat tidak sesuai dengan data yang ada. Pada kenyataannya, angka kriminalitas yang terjadi di Amerika Serikat mayoritas dilakukan oleh *native-born* atau warga lokal Amerika Serikat itu sendiri. Dalam hal ini, penulis menghimpun data terkait perbandingan jumlah angka kriminalitas yang disebabkan oleh imigran dan warga lokal Amerika Serikat pada tahun 2012-2018. Dalam research yang dilakukan oleh National Academy of Sciences, terdapat beberapa kategori kejahatan yang masuk dalam penelitian yaitu penyerangan, perampokan, pencurian, dan kerusakan property. Dari penelitian yang dilakukan National Academy of Sciences, mayoritas tindak kejahatan dilakukan oleh *native-born* atau warga lokal Amerika Serikat itu sendiri. Dalam kejahatan penyerangan, *native born* menunjukkan angka 160% kasus sedangkan imigran baik legal maupun imigran tanpa dokumen menunjukkan angka 131% kasus dan 77% kasus penyerangan. Dalam kasus perampokan, terdapat 29% kasus yang dilakukan oleh warga lokal Amerika Serikat sedangkan imigran hanya menunjukkan angka 17% kasus. Untuk kasus pencurian dan perampokan, warga lokal Amerika Serikat menyumbang kasus sebanyak 99.1% sedangkan imigran menyumbang 54% kasus. (Pnas, 2019). Data tersebut merupakan berbagai jenis kejahatan yang dihimpun dari tahun 2012, masa kepemimpinan Presiden Barack Obama hingga 2018. Jika dilihat secara data yang ada mayoritas kriminalitas dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat itu sendiri. Secara keseluruhan, sumbangsih angka kriminalitas di Amerika Serikat pada kenyataannya tetap didominasi oleh warga lokal.

Penulis juga mendapatkan data tren kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat pada periode yang sama. Angka kriminalitas di Amerika Serikat mengalami tren penurunan dan diimbangi dengan penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh imigran. Dari data tersebut, tidak dapat dijadikan acuan bahwa imigran Muslim

merupakan penyumbang utama kasus kriminalitas di Amerika Serikat dikarenakan kriminalitas di Amerika Serikat mayoritas dilakukan oleh warga Amerika Serikat itu sendiri

Terpilihnya Barack Obama mampu melakukan penurunan dalam sentimen negatif terhadap imigran Muslim di Amerika Serikat setelah hampir satu dekade Amerika Serikat melakukan perang melawan terorisme. Setelah pelantikannya, Obama mulai mengubah citra Amerika Serikat dengan mayoritas Muslim, Obama membuat debut diplomatik dan menjanjikan untuk mengubah cara Amerika Serikat berinteraksi dengan Muslim, dan berusaha untuk memperkuat retorikanya melalui tindakan nyata. Tindakan Obama dinilai mampu mewujudkan perdamaian dan Obama telah mengambil langkah bijaksana dan tepat untuk memperbaiki persepsi imigran Muslim dan cara interaksi warga Amerika Serikat dengan imigran Muslim. (Gerges, 2012). Namun, kritik juga datang kepada Obama. Obama dikatakan memiliki kebijakan luar negeri yang dianggap tidak mementingkan kepentingan dalam negeri Amerika Serikat dan mampu memberikan bahaya bagi keamanan Amerika Serikat.

Obama telah melalui banyak kritikan atas rencananya untuk menerima 10.000 pengungsi dan imigran yang berasal dari Suriah ke Amerika Serikat. Namun meskipun demikian, Obama tetap mengupayakan untuk imigran Muslim tidak terus menerima bentuk diskriminasi dikarenakan tragedi yang pernah terjadi sebelumnya. Pada suatu pidato, Obama menyampaikan bentuk apresiasi terhadap kontribusi imigran Muslim di Amerika Serikat. “Muslim Amerika sama patriotiknya, sama terintegrasinya, sama Amerikanya dengan anggota keluarga Amerika lainnya,” (Garunay, 2016) . Pada pernyataan tersebut, Obama secara eksplisit tidak mendiskriminasikan imigran Muslim dengan masyarakat Amerika Serikat lainnya. Dorongan Obama untuk imigran Muslim juga dimunculkan pada pernyataannya ketika Obama berpidato pada acara kenegaraan.

*“Inilah fakta lain: Islam selalu menjadi bagian dari Amerika. Mulai zaman kolonial, banyak budak yang dibawa ke sini dari Afrika adalah Muslim. Dan bahkan dalam perbudakan mereka, beberapa orang tetap mempertahankan iman mereka. Beberapa bahkan memenangkan kebebasan mereka dan dikenal banyak orang Amerika. Dan ketika mengabadikan kebebasan beragama dalam Konstitusi kami dan Bill of Rights kami, para Pendiri kami bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan ketika mereka mengatakan itu berlaku untuk semua agama.” (Garunay, 2016)*

Hingga memasuki akhir kepemimpinan Barack Obama, Pemerintahan Barack Obama mengupayakan untuk memberikan pemenuhan HAM kepada imigran maupun pengungsi yang memasuki Amerika Serikat termasuk didalamnya imigran Muslim. Obama mengupayakan Amerika Serikat menjadi negara yang ramah terhadap orang asing tanpa adanya diskriminasi dari segi agama, ras, bangsa dan lain lain. Pada akhir masa pemerintahan Barack Obama, persepsi negatif mengenai imigran Muslim telah mereda. Kebencian terhadap imigran Muslim juga mengalami penurunan daripada sebelum masa pemerintahan Obama.

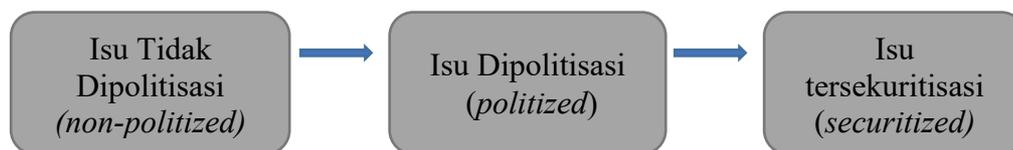
### **Imigran dan Konstruksi Imigran Muslim Masa Presiden Donald Trump**

Setelah selesainya kepemimpinan Barack Obama, pemilihan Presiden Amerika Serikat digelar pada tahun 2016. Terdapat dua kandidat pada pemilihan presiden tahun 2016 yaitu Donald Trump dan Hillary Clinton. Donald Trump sebagai kandidat presiden

dari Partai Republik di tahun 2016 berhasil mengalahkan Hillary Clinton dan menjadi presiden ke 45 Amerika Serikat (Rachman, 2017: 7). Dengan hasil final pemilihan presiden yang dimenangkan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat berdasarkan hasil voting.

Dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2016, Donald Trump mengangkat isu mengenai imigran Meksiko dan imigran Muslim. Isu imigran yang sebelumnya mereda di masa pemerintahan Barack Obama, kembali dimunculkan Donald Trump dengan berfokus pada meningkatnya jumlah Imigran Meksiko yang melakukan penyelundupan obat-obatan terlarang di perbatasan kedua negara. Trump juga berfokus pada imigran beragama Muslim. Fokus Donald Trump pada imigran Muslim dikarenakan terjadinya tragedi penembakan massal di beberapa tempat yaitu San Bernardino dan Orlando yang dilakukan oleh imigran Muslim radikal. Kelompok Muslim radikal berusaha untuk menyebarkan rasa takut dengan melakukan tindak kejahatan terhadap kalangan nonmuslim. Adanya tragedi penembakan massal tersebut memperkuat kampanye isu keamanan yang diangkat Donald Trump ketika menjadi kandidat presiden.

**Gambar 1.** Skema Spektrum Sekuritisasi



Sumber: Buzan, Waever, & Wilde, 1998), diolah oleh penulis

Dalam sekuritisasi suatu isu, terdapat tiga tahapan, yaitu tahap non politis (*non-politized*) yaitu ketika suatu isu masih menjadi bahasan di level masyarakat dan belum menjadi bahasan oleh negara. Lalu politis (*politized*) yaitu ketika isu telah masuk dalam proses politis, dan yang terakhir adalah tersekuritisasi (*securitized*) yaitu ketika isu yang mulanya telah masuk dalam proses politis kemudian disepakati sebagai bentuk ancaman oleh aktor negara sehingga memerlukan tindakan untuk mengatasi isu yang dianggap ancaman tersebut (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). *Speech act* menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan sekuritisasi. Sekuritisasi yang dilakukan oleh negara diharapkan akan diterima oleh masyarakat, sehingga negara dapat membentuk suatu upaya untuk menanggapi isu ancaman tersebut.

Berdasarkan skema sekuritisasi diatas, isu imigran Muslim mulanya merupakan isu non politis. Isu imigran sebelum pemilihan presiden Donald Trump merupakan isu yang merupakan pembahasan di level masyarakat. Isu imigran dan konstruksi negative terhadap imigran Muslim telah mereda pada masa pemerintahan Barack Obama. Tingkat diskriminasi terhadap imigran Muslim telah menurun sehingga tidak memerlukan sekuritisasi terhadap isu imigran Muslim di masa pemerintahan Obama. Namun, Ketika Pemilihan presiden 2016 berlangsung, Donald Trump mengangkat kembali isu imigran Muslim dengan mengingat kembali peristiwa 9/11. Donald Trump memfokuskan kampanye pada isu imigran Muslim dan isu terorisme, hal ini dapat dilihat dalam pidato yang dilakukan Donald Trump mengenai terorisme dan imigran Muslim sebagai ancaman keamanan Amerika Serikat. Pada kampanye pemilihan presiden 2016, Donald Trump mengupayakan isu imigran Muslim yang mulanya merupakan isu non politis untuk menjadi isu politis dan menjadi pembahasan bagi pemerintah Amerika Serikat. Kemudian Setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

membawa isu imigran Muslim pada proses politis, hingga akhirnya isu imigran Muslim disepakati sebagai bentuk ancaman sehingga memerlukan tindakan untuk mengatasi isu yang dianggap sebagai ancaman tersebut (*securitized*).

Sekuritisasi merupakan konsep dari keamanan nasional yang menekankan pada pihak otoritas dalam mengonstruksi isu yang mulanya tidak politis menjadi isu politis sehingga memerlukan adanya pengamanan atau tindakan darurat. Tiga unsur penting dalam analisis teori sekuritisasi adalah *functional actor*, *securitizing actor*, dan *referent object*. *Securitizing actor* dalam hal ini adalah pihak yang mengkonstruksikan suatu isu sebagai ancaman dan melakukan sekuritisasi terhadap isu atau fenomena yang dianggap mengancam, sedangkan pihak atau sesuatu yang dirasa terancam (*referent object*) adalah negara karena berkaitan dengan konteks keamanan nasional. *Securitizing actor* melakukan sekuritisasi bila *referent object* dianggap mendapatkan ancaman dari suatu isu. Sedangkan *functional actor* merupakan aktor yang terlibat dalam proses sekuritisasi (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 36). Aktor memiliki kemampuan dalam menjadikan isu sebagai bentuk ancaman dan menerapkan sekuritisasi dalam situasi tersebut. Aktor akan mengidentifikasi isu dan mengubahnya menjadi isu keamanan. Untuk mencapai sekuritisasi, aktor melakukan *speech act* yang kemudian diterima oleh aktor lain, umumnya masyarakat. Dengan diterimanya *speech act* oleh masyarakat, maka dapat digunakan sebagai dasar melakukan tindakan untuk mengatasi isu yang dikonstruksi sebagai ancaman tersebut..

Donald Trump dalam pemilihan Presiden mengangkat fokus mengenai keamanan bagi warga Amerika Serikat. Donald Trump menggunakan slogan “*Make America Great Again*” yang bertujuan untuk membuat Amerika Serikat berubah menjadi lebih baik dalam politik dunia (Kellner, 2018: 9). Slogan Donald Trump dimunculkan dalam setiap pidato kampanye pemilihan presiden, Donald Trump menyatakan,

*“America will no longer settle for anything less than the best. We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. We're going to dream of things for our country, and beautiful things and successful things once again. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, with everyone. All people and all other nations.”*  
(CNN, 2016: 3)

Dengan fokus kampanye tersebut, maka jelas terlihat bahwa isu imigran Muslim merupakan isu yang dapat mengganggu keamanan bagi warga Amerika Serikat sehingga Donald Trump mengupayakan untuk melakukan sekuritisasi pada isu imigran Muslim. Dalam penjelasan teori sekuritisasi, Donald Trump merupakan *securitizing actor* yang melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu. *Securitizing actor* akan melakukan *speech act* mengenai isu sehingga terbentuk konstruksi bahwa isu tersebut merupakan ancaman dan membutuhkan tindakan pengamanan. *Speech act* yang dilakukan Donald Trump ditujukan kepada warga negara Amerika Serikat sebagai *referent object*. *Speech act* juga dilakukan oleh *securitizing actor* dengan tujuan agar audiens dari *speech act* tersebut akan melakukan sesuai yang diharapkan oleh *securitizing actor*. Dalam hal ini, sejak pemilihan presiden, Donald Trump telah banyak melakukan *speech act* mengenai isu imigran Muslim.

Dalam suatu pidato, Donald Trump melakukan *speech act* yang menyorot pada imigran Muslim, Trump mengatakan bahwa, “*Total and complete shutdown should*

*remain until the US (United States) authorities can figure out Muslims attitudes to the US (United States)”* (BBC,2017). pernyataan Trump tersebut menunjukkan adanya ketidakpercayaan Donald Trump terhadap imigran Muslim. Kalimat kecurigaan tersebut disampaikan dalam pidato kampanye dan bertujuan agar audiens juga memunculkan kecurigaan terhadap imigran Muslim. Donald Trump juga menyatakan,

*“They should be banned until our country’s representatives can figure out what is going on, that would apply to everybody, that would be immigrants and tourists. Until we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our country cannot be the victims of horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have no sense of reason or respect for human life”* (CNN,2016).

Dari pernyataan tersebut, Donald Trump melarang masuknya imigran Muslim untuk memasuki Amerika Serikat dikarenakan ideologi dan ancaman yang dibawa oleh imigran Muslim bila memasuki Amerika Serikat. Tidak hanya melalui pidato, Trump juga aktif mengutarakan pernyataannya melalui sosial media yang dimilikinya. Trump aktif melakukan *speech act* yang membentuk konstruksi ancaman pada imigran Muslim. Dalam sosial mediana, Donald Trump memberikan pernyataan, *“If elected The president of the United States—I will stop RADICAL ISLAMIC TERRORISM in this country! In order to do this, we need to #DrainTheSwamp!”* (Khan, 2021). Pernyataan tersebut mengandung unsur konotasi negatif terhadap imigran Muslim. Dalam pernyataan tersebut, Donald Trump menggeneralisir semua yang beragama Muslim merupakan islam radikal. Kata *“Swamp”* yang digunakan dalam pernyataan Donald Trump di sosial media nya merupakan kata yang berkonotasi negatif. *Swamp* diartikan sebagai “rawa” atau genangan air yang keruh. Donald Trump menggunakan kata *“Swamp”* dengan maksud bahwa imigran Muslim telah merubah Amerika Serikat menjadi negara yang berisi hal hal yang memperkeruh keamanan Amerika Serikat. Menyebabkan Amerika Serikat tidak menjadi negara yang aman.

Donald Trump juga membentuk konsepsi negatif terhadap lawan pemilihan Presiden yaitu Hillary Clinton. Donald Trump memberikan pernyataan yang membentuk konsepsi bahwa Hillary mendukung masuknya terorisme di Amerika Serikat. Donald Trump memberikan pernyataan, *“Incompetent Hillary, despite the horrible attack in Brussels today, wants borders to be weak and open and let the Muslims flow in. No way!”* (Khan, 2021). Donald Trump melakukan *speech act* tersebut untuk mendapatkan dukungan publik dan menjatuhkan lawannya dengan memberikan pernyataan kebencian terhadap imigran Muslim. Donald Trump menggeneralisir semua imigran Muslim merupakan islam radikal. Dengan *speech act* tersebut, Donald Trump berharap dapat mampu membuat audiens memiliki anggapan yang sama terhadap imigran Muslim.

Donald Trump juga melakukan *Speech act* ketika Obama mengizinkan 10.000 imigran dari Suriah untuk memasuki Amerika Serikat. Donald Trump memunculkan ketidakperayaan pada imigran yang masuk dari Suriah dengan pernyataan, (Kruglanski, 2019)”. Donald Trump memunculkan kecurigaan dan menganggap kebijakan yang diambil oleh Obama merupakan kebijakan yang tidak mementingkan keamanan Amerika Serikat. Tidak hanya melakukan *speech act* terhadap apa yang sedang terjadi Amerika Serikat, Donald Trump juga melakukan *speech act* pada peristiwa yang terjadi di negara lain. Donald Trump memberikan pernyataan terkait kenaikan angka kriminalitas yang

terjadi di Inggris, *“Just out report: “United Kingdom crime rises 13% annually amid spread of Radical Islamic terror. Not good, we must keep America safe!”* (Khan, 2021).

Speech act Donald Trump tersebut membentuk persepsi bahwa imigran Muslim akan menyebarkan terror islam radikal di setiap negara yang didatangi. Meskipun hal tersebut merupakan peristiwa yang terjadi di Inggris, Donald Trump menetapkan gagasan bahwa peristiwa islam radikal yang terjadi di Inggris akan terjadi di Amerika Serikat dikarenakan masuknya imigran Muslim ke Amerika Serikat. Pernyataan Donald Trump membentuk konstruksi pentingnya menjaga keamanan Amerika Serikat dari imigran Muslim. Imigran Muslim digeneralisir dengan islam radikal yang membawa ancaman bagi negara. Generalisir imigran Muslim dengan islam radikal tersebut memunculkan kebencian dan penolakan terhadap masuknya imigran Muslim. Trump menggunakan diskursus yang memunculkan rasa ketakutan terhadap masuknya imigran Muslim. Donald Trump juga selalu membandingkan dengan masa Presiden Obama yang dikatakan tidak tegas terhadap masuknya imigran Muslim. Pada sosial media pribadinya, Trump memberi pernyataan, *“When I became President, ISIS was out of control in Syria & running rampant. Since then tremendous progress made . . . Caliphate will soon be destroyed, unthinkable two years ago”* (Kruglanski, 2019). Pernyataan tersebut membentuk keyakinan bahwa dirinya akan memperbaiki Amerika Serikat dan membandingkan pemimpin terdahulu yang dikatakan lalai terhadap keamanan.

Ketika memasuki masa Pemilihan Presiden, Trump menyatakan, *“72% of refugees admitted into the U.S. (2/3 -2/11) during COURT BREAKDOWN are from 7 countries: Syria, Iraq, Somalia, Iran, Sudan, Libya & Yemen”* (Kruglanski, 2019). Di sini, Trump menyiratkan bahwa terjadi migrasi besar besaran yang berasal dari ketujuh negara mayoritas Muslim dan akan berbahaya bagi Amerika Serikat. Gagasan ini terus-menerus muncul dalam wacananya, yang membongkar identitas umat Islam secara umum karena ketujuh negara yang didaftar adalah mayoritas Muslim. Dengan pernyataan mengenai persepsi buruk imigran Muslim tersebut, Donald Trump memperkuat kampanye nya dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan berada pada kondisi aman ketika Donald Trump memimpin. *“We cannot let our citizens suffer because of the brutal attacks from persons who deify jihad and do not have common sense or humanity towards human life. If I am elected to lead this country as president, together we will make America great again”*(politico, 2016).

Donald Trump juga memberikan pernyataan yang mempertegas bahwa Amerika Serikat akan menjadi negara yang aman dari terorisme bila Trump memimpin dalam pernyataan *“If am elected president, I will stop the flow of immigration from all regions where there has been a history of terrorism that has proven to attack the United States, Europe or our allies, until we understand how to end this threat”* (politico, 2016).

Ketika terjadi penangkapan terhadap pengungsi yang berasal dari Suriah di perbatasan Amerika Serikat, Donald Trump menunjukkan kecurigaan terhadap pengungsi tersebut dan memberikan pernyataan melalui sosial media pribadinya *“Eight Syrians were just caught on the southern border trying to get into the U.S. ISIS maybe? I told you so. We Need A Big & Beautiful Wall!”* (Khan, 2021). Dalam pernyataan tersebut, Donald Trump membentuk persepsi bahwa pengungsi tersebut merupakan anggota ISIS sehingga Amerika Serikat memerlukan keamanan yang lebih ketat untuk menghindari Amerika Serikat dari ancaman. Trump mendefinisikan pengungsi Suriah tersebut sebagai pelaku kejahatan daripada sebagai pengungsi yang membutuhkan bantuan. Sekali lagi, Donald Trump merendahkan pengungsi Suriah dan berpendapat bahwa mereka bisa mencemari Amerika Serikat.

Pada suatu wawancara media, Donald Trump memberikan pernyataan “*They have to hand over people who bombed planes. And they know who those people are. And we will not find people just by continuing to be kind and gentle*” (CNN, 2016). pernyataan tersebut memiliki maksud bahwa imigran Muslim harus menyerahkan orang-orang Muslim yang terlibat dalam aksi terorisme. Secara tidak langsung, Donald Trump menuduhkan bahwa semua imigran Muslim mengenal pelaku terorisme dan merupakan kelompok yang sama dengan pelaku terorisme.

Setiap terjadi aksi kriminalitas dan serangan terorisme di Amerika Serikat, Donald Trump mengklaim bahwa insiden tersebut disebabkan oleh imigran Muslim dan imigran Muslim harus bertanggung jawab terhadap kriminalitas yang terjadi “*Children of American Muslim parents, they are responsible for the increasing number for whatever reason increasing terrorist attacks*” (Johnson & Hauslohner, 2017). Dalam pernyataan ini, umat Islam diasosiasikan sebagai sekelompok orang yang membawa serangan tanpa pandang bulu terhadap warga Amerika Serikat atas nama jihad dan juga dianggap kejam terhadap kehidupan manusia. Tanpa konteks detail mengenai informasi tentang siapa yang dimaksud membawa ancaman oleh Trump baik dari latar belakang kewarganegaraan dan afiliasi dengan organisasi tertentu, Trump secara langsung menggeneralisasi semua Muslim adalah teroris. Diikuti oleh pernyataan bahwa ketika dia terpilih presiden, dia akan mengembalikan Amerika Serikat untuk menjadi negara besar lagi. Pernyataan tersebut menggarisbawahi isu terorisme yang telah menjadi bagian dari sejarah kelam Amerika Serikat dalam peristiwa tragis 9/11 yang secara implisit mengandung kesepakatan untuk menganggap bahwa setiap negara yang terindikasi (meskipun belum terbukti) terkait aksi terorisme terhadap Amerika Serikat, Eropa, dan sekutunya, merupakan ancaman nyata.

Donald Trump membentuk pembeda antara warga Amerika Serikat dengan imigran Muslim. Donald Trump menggunakan bahasa untuk membentuk identitas nasionalnya secara diskursif sebagai orang Amerika Serikat dan menciptakan perbedaan “kita versus mereka.” Trump menggunakan sejumlah strategi untuk memajukan agenda politiknya dengan retorika Islamofobia. Donald Trump berusaha untuk membangun bentuk identitas yang khas. Strategi tersebut bertujuan untuk membentuk citra tentang pengertian kesatuan dan kesamaan antara orang-orang (in-group) dan orang-orang (out-group). Dalam *speech act* nya, Trump menggunakan strategi konstruktif untuk membangun identitasnya sebagai orang Amerika Serikat. Donald Trump membentuk penyatuan rakyat Amerika Serikat melawan imigran Muslim tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di Amerika Serikat namun juga di seluruh dunia dengan melakukan *speech act* di media massa. Dengan melakukan membangun identitas Trump menghindari kemungkinan adanya berbagai kelompok sosial di Amerika Serikat terkhususnya adanya kelompok imigran muslim, Hal ini menciptakan biner bahwa imigran Muslim tidak bisa menjadi orang Amerika Serikat

Kedua, Donald Trump juga menggunakan strategi konstruktif dalam kampanye pemilihannya di mana Donald Trump memfitnah kampanye pemilihan Hillary Clinton. Trump memainkan "Muslim vs Amerika Serikat" dan mengidentifikasi dirinya sebagai Amerika, Serikat sambil menyoroti simpati Hillary untuk Muslim, dan kelompok etnis lainnya. Donald Trump menyoroti kelompok imigran muslim dalam kategori "mereka". Dengan melakukan strategi konstruktif, Trump menggambarkan dirinya sebagai penyelamat bagi Amerika Serikat dan membentuk persepsi bahwa Hillary sebagai musuh Amerika Serikat dikarenakan mendukung masuknya “mereka”. Cara realisasi Trump untuk membangun identitasnya sebagai seorang nasionalis Amerika yaitu dengan

melakukan perbandingan eksplisit antara dirinya dan Hillary. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dicapai dengan menciptakan sumber ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap imigran Muslim sebagai “mereka”. Dengan cara ini masyarakat mengetahui siapa yang harus dipercaya dan siapa yang harus ditakuti. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa Trump sedang berusaha untuk memperkuat anggapan bahwa Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya nanti akan menjadi pihak yang dapat dipercaya karena akan memperketat migrasi penduduk Muslim ke Amerika Serikat, sehingga masyarakat harus mendukung kebijakannya. Di sisi lain, Trump juga berhasil menciptakan citra imigran Muslim sebagai pihak yang harus ditakuti. Pada tahap ini, pembingkaiannya melalui *speech act* oleh pelaku sekuritisasi dianggap mampu membangkitkan keyakinan atau asumsi tertentu.

Dengan melakukan analisis terhadap *speech act* Trump, mengungkapkan bahwa Trump menggunakan bahasa untuk menciptakan polaritas antara “kita versus mereka” untuk menggambarkan imigran Muslim secara negatif. Trump mencoba untuk menggambarkan lawan politiknya, Hillary Clinton, secara negative dengan Tujuan untuk menggambarkan baik Muslim maupun Hillary Clinton sebagai pengaruh negatif sehingga dapat membentuk persepsi bahwa Trump merupakan orang Amerika Serikat sejati. Trump menggunakan strategi konstruktif untuk membangun identitasnya sebagai seorang nasionalis Amerika Serikat yang tujuannya hanya untuk melindungi Amerika Serikat dari Muslim yang tinggal di Suriah, Pakistan, Iran, Oman, dan Libya. Wacana Trump adalah populis karena menciptakan retorika kita versus mereka, di mana ia menempatkan “kita”, yaitu, Amerika Serikat sebagai pembawa kedamaian dan negara-negara Muslim dalam oposisi biner di mana mereka bertanggung jawab karena merebut masa lalu Amerika Serikat yang hebat. Trump mengandaikan Amerika dalam kondisi buruk karena Islam dan pengungsi Muslim yang telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

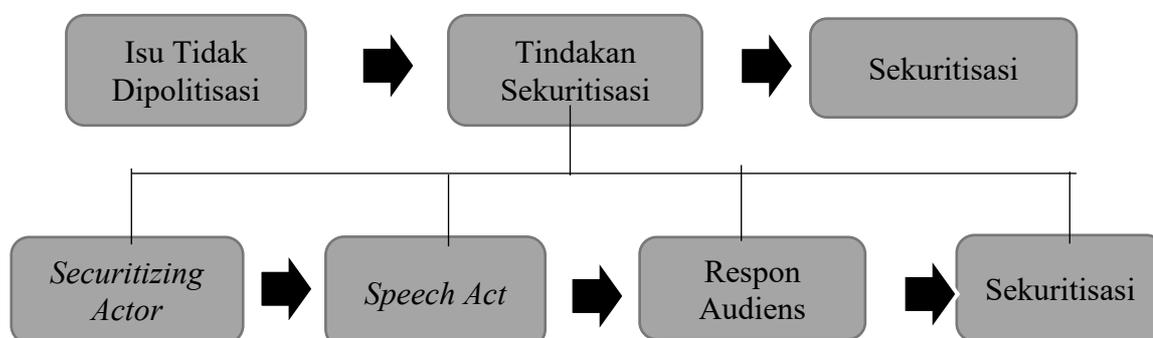
Bahkan setelah terpilih sebagai Presiden, Trump tidak berhenti membentuk konstruksi terhadap imigran Muslim. Tidak dapat disangkal bahwa para pemimpin politik memiliki kekuasaan yang luar biasa besar atas massa. Pemimpin politik memiliki kuasa tidak hanya untuk membuat undang-undang namun juga memiliki kuasa dalam membentuk narasi massa. Setelah dilantik secara resmi, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tahun 2017 menyatakan “*We have to be tough and we have to be safe and we have to be secure*” (BBC, 2018: 2). Pernyataan tersebut sebagai keyakinan Donald Trump untuk membentuk suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keamanan Amerika Serikat. Trump sangat konsisten dalam pernyataan yang dijanjikan mengenai imigrasi, terutama terhadap imigran Muslim. Kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ancaman terorisme yang diungkapkan Trump sebagai bagian dari kelompok Muslim radikal. Dengan memastikan bahwa mereka adalah ancaman, untuk alasan keamanan nasional segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan ancaman tersebut harus mendapat dukungan penuh dari negara.

Sesuai dengan pernyataan tersebut Donald Trump dengan kewenangannya membentuk suatu skema perlindungan terhadap warga negara melalui pembentukan executive order atau perintah eksekutif. Perintah eksekutif yang dibentuk Donald Trump tersebut adalah *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States (Executive Order 13769)*. Executive order tersebut resmi dikeluarkan pada 27 Januari 2017 dan digunakan sebagai upaya memberikan perlindungan bagi warga negaranya dari orang asing yang berasal dari tujuh negara Muslim yang dirasa memiliki tujuan untuk melakukan serangan terorisme dan kriminalitas di Amerika Serikat (US Government, 2017: 3). *Executive order Protecting the Nation From Foreign Terrorist*

*Entry Into the United States* ini memberikan larangan pada warga negara dari Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman yang dikategorikan sebagai negara sumber teroris (US Government, 2017: 4). Kebijakan tersebut memuat aturan aturan yang diperuntukkan untuk warga negara yang berasal dari negara yang telah disebutkan baik yang berstatus imigran maupun non imigran.

Meskipun kebijakan tersebut mendapatkan banyak penolakan pada mulanya, namun kebijakan *Executive order Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* resmi diberlakukan pada Desember 2017 dengan izin dari James Roberts sebagai Ketua Hakim Pengadilan. James Roberts beranggapan bahwa, “*As long as the president presents an explanation for the travel ban that is "plausibly related" to a legitimate national security objective*”(BBC, 2017)

**Gambar 2.** Skema Sekuritisasi



Sumber : Buzan, Waever, & Wilde, 1998), diolah oleh penulis

Dengan mengacu skema sekuritisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa Donald Trump telah berhasil melakukan sekuritisasi terhadap isu imigran Muslim. Sesuai dengan alur sekuritisasi, isu imigran Muslim mulanya merupakan isu yang tidak politis. Bahasan mengenai isu imigran hanya merupakan bahasan di level masyarakat dan tidak dikategorikan sebagai ancaman untuk masyarakat. Ketika masa pemerintahan Obama, isu imigran semakin meredam dan Obama mengupayakan agar imigran Muslim di Amerika Serikat tidak mendapatkan diskriminasi maupun perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat Amerika Serikat. Obama memberikan apresiasi kepada imigran Muslim dan memberikan pengakuan bahwa imigran Muslim di Amerika Serikat merupakan bagian dari satu kesatuan. Tragedi 9/11 tidak menjadi acuan bagi Obama dalam memandang imigran Muslim di Amerika Serikat. Dalam menanggapi masuknya imigran Muslim ke Amerika Serikat, Obama secara terang terangan membuka Amerika Serikat terhadap imigran Muslim.

Sekuritisasi memiliki sifat intersubjektif serta dikonstruksi secara sosial. Actor dari sekuritisasi memiliki kemampuan untuk mengonstruksikan isu menjadi ancaman. Keberhasilan sekuritisasi tidak hanya dilihat dari aktor yang mendukung, namun juga tindak tutur yang digunakan oleh actor tersebut dalam membentuk konstruksi terhadap suatu isu. Isu imigran yang mulanya tidak politis, menjadi perhatian bagi Donald Trump selaku kandidat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016. Donald Trump menilai Obama tidak mementingkan keamanan Amerika Serikat karena menerima masuknya orang Asing ke Amerika Serikat. Donald trump mengkritik Obama secara

terang terangan dan menyatakan bahwa Obama tidak memahami bagaimana pentingnya menjaga keamanan masyarakat Amerika Serikat.

Donald Trump memfokuskan kampanye pada isu imigran Muslim yang menurutnya dapat meningkatkan ancaman kriminalitas dan terorisme di Amerika Serikat. Isu imigran Muslim yang mulanya bukan isu politik, dimunculkan kembali dan digambarkan sebagai ancaman oleh Donald Trump. Donald Trump terus menggunakan isu imigran dalam setiap kampanye yang dilakukan. Trump menggunakan kata-kata yang berkonotasi buruk untuk menggambarkan imigran Muslim di Amerika Serikat. Tindakan Donald Trump tersebut merupakan suatu tindakan politisasi. Trump mencoba meyakinkan masyarakat AS bahwa kasus kriminal dan kasus terorisme dilakukan oleh imigran yang membahayakan Amerika Serikat, terjadi karena tidak adanya aturan ketat yang mengatur dinamika imigrasi di Amerika Serikat dan implementasinya

*“The threat of immigrants has caused attacks and terrorism that threatens terrorism our way of life and claiming many innocent Americans because our politicians have failed in their duty to secure our borders. Any politician who does not understand this danger is not fit to lead us to the country”* (Ball, 2016)

Trump merupakan *securitizing actor* yang melakukan *speech act* terhadap isu imigran Muslim. *Speech act* yang dilakukan bertujuan untuk membentuk persepsi negatif terhadap imigran Muslim. Tujuan dari *speech act* yang dilakukan adalah agar masyarakat yang merupakan audiens dari *speech act* tersebut dapat menerima dan menyetujui maksud Donald Trump terhadap imigran Muslim tersebut. Pidato keamanan Trump berhasil menjadikannya pemenang pemilihan presiden dengan perolehan 304 suara *electoral college* (Shabad, 2017). Sedangkan syarat minimal seorang calon untuk memenangkan pemilihan presiden adalah memenangkan 270 *electoral college*. Sejak masa kampanye hingga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, Donald Trump terus mengangkat isu imigran Muslim dan melakukan *speech act* terhadap isu tersebut.

Donald Trump memimpin dukungan untuk rencana melarang imigran Muslim memasuki Amerika Serikat “*Donald Trump voiced and emphasized the total halt of Muslim immigration to the United States until we could find out what was happening, it was like hell, we had no other choice, really we had no choice*” (Johnson, 2015).

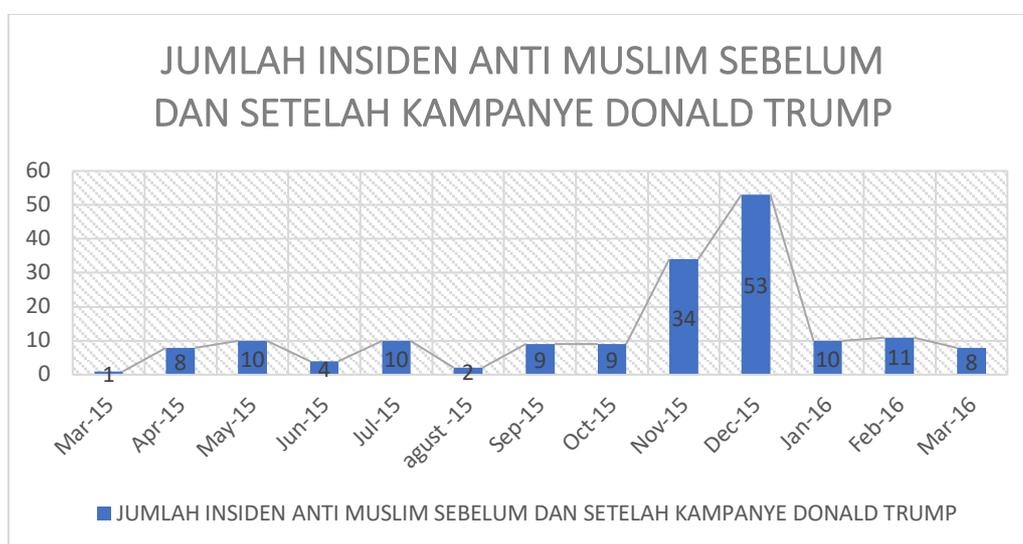
### **Dampak sekuritisasi isu imigran Muslim dan kebijakan *Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into The United States***

Tidak hanya berdampak pada jumlah permohonan visa dari negara yang dilarang dalam kebijakan *Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into The United States*, kebijakan dan sekuritisasi yang dilakukan Trump juga berdampak pada meningginya angka anti Muslim (Islamophobia) di Amerika Serikat. Setelah Donald Trump memunculkan rancangan kebijakan dan melakukan upaya sekuritisasi dengan *speech act*, persepsi publik dalam memandang imigran muslim dan kebijakan yang dibuat Trump mengalami perubahan. Associated Press dan Universitas Pusat Publik NORC Chicago melakukan survey terkait pemahaman masyarakat terhadap alasan pembentukan kebijakan dan besarnya dukungan terhadap rancangan kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump. Dari survey tersebut, ditemukan bahwa terdapat 87% orang masyarakat memiliki persepsi ancaman terhadap masuknya imigran muslim dan meyakini bahwa perintah

eksekutif tersebut merupakan upaya keamanan nasional dari kriminalitas dan terorisme yang dapat disebabkan oleh imigran. Dari survey tersebut 87% masyarakat bersedia untuk diberlakukannya kebijakan demi keamanan Amerika Serikat. Survey juga memunculkan hasil sekitar 57% masyarakat mengatakan larangan tersebut membuat mereka merasa “lebih aman” dari ancaman yang dapat diberikan imigran muslim di masa mendatang (NORC, 2016). Tidak hanya survey dari Associated Press dan Universitas Pusat Publik NORC Chicago, Media Reuters/Ipsos juga melakukan survey serupa terkait kesediaan masyarakat untuk menyetujui diberlakukannya kebijakan. Dari survey tersebut menemukan bahwa 51 persen masyarakat mengatakan mereka “sangat setuju.” Bila kebijakan disahkan (Kahn, 2017).

Setelah kampanye Donald Trump, dukungan masyarakat terhadap kebijakan semakin meningkat dan jumlah serangan kebencian berbasis Islamofobia semakin banyak muncul di liputan media. Terdapat peningkatan jumlah insiden sentimen anti-Muslim yang dikaitkan dengan kampanye Trump sebelum menjabat sebagai presiden.

**Grafik 3.** Peningkatan Jumlah Insiden Anti Muslim Setelah Kampanye Donald Trump



*Sumber : Georgetown University Report, 2017, diolah oleh penulis*

Jumlah anti Muslim tertinggi terjadi pada bulan Desember 2015 setelah kandidat pemilihan presiden, yaitu Donald Trump memperkenalkan rencana kebijakan Muslim travel ban ketika kampanye pemilihan presiden. Sentimen anti-Muslim terus berlangsung hingga setelah Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Tindakan anti Muslim tersebut berupa vandalisme, ekspresi kebencian individu dan serangan yang mengakibatkan luka ringan tembakan dan serangan terhadap kelompok Muslim.

Beberapa serangan terhadap kelompok Muslim salah satunya adalah tragedi penembakan Minneapolis shooting. Penembakan terhadap 5 orang Somalia yang dilakukan oleh anti Muslim (Harvard, 2016). Penembakan dilakukan oleh seorang pria Amerika Serikat dan meneriakkan slogan anti Muslim Ketika melakukan penembakan tersebut. Aksi tersebut terjadi pada 29 juni 2016. Insiden anti Muslim juga tidak hanya ditujukan kepada imigran yang berasal dari Timur Tengah, namun juga ditujukan untuk imigran lain. Seperti dalam insiden anti Muslim yang terjadi pada 19 Juli 2016, Seorang Imigran India di Nebraska diserang hingga pingsan oleh seseorang yang berteriak "ISIS, keluar dari negara saya!" sambil terus menyerang imigran tersebut (Roberts, 2016). Penyerangan terhadap imigran muslim terus berlanjut sepanjang tahun 2016 hingga 2017.

Terjadi aksi pembakaran Masjid di Florida yang dilakukan oleh kelompok anti muslim pada 12 September 2016 (Hyman, 2016) hingga terjadi pengeboman di Islamic center Dar Al Farooq pada 5 Agustus 2017 (Chuck, 2017).

Sekuritisasi migrasi yang seharusnya menjadi tindakan pencegahan bahaya yang mungkin datang dari migrasi bebas, telah berubah menjadi tuduhan dan penilaian imigran asing karena politisasi ketakutan, khususnya umat Islam secara keseluruhan sebagai ancaman nyata yang harus diberantas. Penggunaan politisasi ketakutan dengan mengasosiasikan imigran asing khususnya imigran Muslim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional telah menyebabkan opini publik untuk membenci dan mengutuknya. Hal ini mempengaruhi rasa ketidakamanan Amerika Serikat terhadap imigran, terutama Muslim dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan berbasis Islamofobia untuk melindungi keamanan mereka. Namun, ini justru membuat warga Amerika kejam atas tindakan mereka.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* bertujuan untuk mendeteksi setiap individu yang memasuki Amerika Serikat tidak memiliki ikatan dengan terorisme atau tragedi terorisme 9/11. *Executive order Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* ini memberikan larangan pada warga negara dari Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman yang dikategorikan sebagai negara sumber teroris (US Government, 2017: 4). Kebijakan tersebut memuat aturan-aturan yang diperuntukkan untuk warga negara yang berasal dari negara yang telah disebutkan baik yang berstatus imigran maupun non imigran. Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat sangat berperan penting dalam pembentukan kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*. Untuk suatu kebijakan dapat diberlakukan, elit politik memerlukan dukungan publik sebagai dasar diberlakukannya kebijakan. Donald Trump berperan dalam membentuk konstruksi ancaman pada isu imigran Muslim sehingga dasar pembentuk kebijakan menjadi lebih kuat. Dari analisis dalam penelitian, tidak dapat disangkal bahwa elit politik suatu negara memiliki kekuasaan yang luar biasa besar atas massa. Elit politik negara memiliki kuasa tidak hanya untuk membuat kebijakan namun juga memiliki kuasa dalam membentuk narasi massa. *Executive order Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* resmi dikeluarkan pada 27 Januari 2017 dan digunakan sebagai upaya memberikan perlindungan bagi warga negaranya dari orang asing yang berasal dari tujuh negara Muslim yang dirasa memiliki tujuan untuk melakukan serangan terorisme dan kriminalitas di Amerika Serikat

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si. selaku dosen pembimbing dan terimakasih kepada Mas Satwika Paramasatya, SIP, M.A. selaku dosen pembimbing penulis. Serta terima kasih kepada Mas Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. selaku dosen penguji penulis yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

## **REFERENSI**

Barry, O. W. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. . London: Lynne Rienner.

- BBC. (2018, Juni 26). *Travel ban: Trump hails 'tremendous' Supreme Court* . Retrieved September 12, 2021, from <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44619976>
- CNN. (2020, January 21). *CNN Editorial Research*. Retrieved October 11, 2021, from <https://edition.cnn.com/2013/07/04/us/donald-trump-fast-facts/index.html>
- Eisen, J. B. (2003). The Trajectory of "Normal" After 9/11: Trauma, Recovery and Post-Traumatic Societal Adaptation. *14Fordham Envtl. Law J.* , 499.
- Garunay, M. (2016, July 21). *President Obama to Muslim Americans: "You're a Valued Part of the American Family"*. Retrieved from The White House: <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/07/25/president-obama-hosts-eid-reception>
- Gerges, F. A. (2012). *Obama and the Middle East: The End of America's Moment?* New York: Palgrave MacMillan.
- Government, U. (2017, March 3). *Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*. Retrieved October 13, 2021, from Retrieved from National Security and Defence: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-fore>
- Kaczynski, A. (2019, Januari 19). *Trump was saying 'Make America Great Again' long before he claims he thought it up*. Retrieved October 10, 2021, from <https://edition.cnn.com/2017/01/18/politics/kfile-trump-maga-origins/index.html>
- Kellner, D. (2018). Donald Trump and the War on the Media From Election '16 into the Trump Presidency. *The Trump Presidency, Journalism, and Democracy*.
- Khan, H. M. (2021). Trump and Muslims: A Critical Discourse Analysis of Islamophobic Rhetoric in Donald Trump's Selected Tweets. *SAGE*, 5.
- Kruglanski, A. (2019, July 19). *Are Syrian refugees a danger to the West?* Retrieved from The Conversation : <https://theconversation.com/are-syrian-refugees-a-danger-to-the-west-113803>
- Mekouar, D. (2021, October 10). *How 9/11 Changed Arab and Muslim Americans*. Retrieved from VOA News: <https://www.voanews.com/a/6222700.html>
- Michael T. Light, J. H. (2020). Comparing crime rates between undocumented immigrants, legal immigrants, and native-born US citizens in Texas. *PNAS Research Article*.
- Rachman, M. A. (2018). Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16811>, 6.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional dari Perspektif Klasik Sampai Non Barat*. Depok: Rajawali Pers.
- Sagas, E. &. (2020). Build the Wall and Wreck the System: Immigration Policy in the Trump Administration. . *Tex. Hisp. JL & Pol'y*, 26, 21.
- Sahide, A. (2021). Home / Archives / Vol. 17 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional / Research Articles Proteksionisme Trump dan Masa Depan Supremasi Politik AS. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional by Universitas Katolik Parahyangan* .
- Searle, J. R. (1969). *Speech Act: An Essay on the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Winders, J. (2016). Immigration and the 2016 Election. *Southeastern Geographer*. DOI:10.1353/sgo.2016.0034.